



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Soeharto Km 5 Kalierang, Selomerto Wonosobo Telp. (0286) 321049, Fax 33221148

Website: [dpupr.wonosobokab.go.id](http://dpupr.wonosobokab.go.id), e-mail : [dpupr@wonosobokab.go.id](mailto:dpupr@wonosobokab.go.id)

WONOSOBO

56361

Wonosobo,

Maret 2023

Kepada Yth : Kepala DISKOMINFO

Kabupaten Wonosobo

di.

WONOSOBO

SURAT PENGANTAR

Nomor : 487.2/1359 /DPUPR

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1	Surat Usulan DIP-DIK Tahun 2023	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat, untuk menjadikan periksa guna seperlunya

Diterima tanggal : .....  
Penerima : *[Signature]* 5/4/23

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo

.....  
NIP.

*[Signature]*  
NURUDIN ARDIYANTO, ST, MT

Pembina Tk I

NIP. 19731021 200003 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN WONOSOBO**

Nomor : 487.2/d451 /DPUPR

**TENTANG :**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN WONOSOBO**

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Mengingat : 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010



Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 741);

14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 22);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 23);
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2014 tentang Informasi Yang Dikecualikan Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 7);
19. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 480/154/2022 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022;
20. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo Nomor : 489/0132/DPUPR tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo Tahun 2023

MEMUTUSKAN :


Menetapkan  
KESATU

:  
: Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik pada Dinas

- Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan serta merta dan Informasi wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 31 Januari 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG  
KABUPATEN WONOSOBO



NURUDIN ARDIYANTO, ST., MT  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19731021 200003 1 003

Salinan disampaikan Kepada:

1. Sekretaris Daerah Kab. Wonosobo;
2. Asisten Administrasi Sekda Kab. Wonosobo;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Wonosobo;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas  
Umum dan Penata  
Kabupaten Wonosobo  
Nomor : 487.2/04/  
Tanggal : 31 Januari

DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023

1. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO.	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
1	2	3	4	5	6	7
A. INFORMASI TENTANG PROFIL BADAN PUBLIK						
1	Informasi Kedudukan domisili beserta alamat lengkap	Jl. Soeharto Km. 5 Desa Kalherang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah 56361 Telp./Fax. : (0286) 3321148 Email : dpupr@wonosobo.go.id Website : dpupr.wonosobokab.go.id	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital
2	Visi Dan Misi	Visi : TERWUJUDNYA WONOSOBO YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN SEJAHTERA ; Misi : Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat; Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi ;	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital



1	2	3	4	5	6	7
B	RINGKASAN PROGRAM DAN KEGIATAN					
1	Penetapan kinerja	Ringkasan Penetapan Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital
2	Daftar Program, Kegiatan dan Anggaran	Mengurai Daftar Program, Kegiatan dan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital
3	Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan atau alamat yang dapat dihubungi	Memuat para penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan utama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital
4	Target dan/ atau capaian program dan kegiatan	Memuat target dan capaian program dan kegiatan utama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital
5	Jadwal Pelaksanaan program dan kegiatan	Memuat jadwal pelaksanaan program dan kegiatan utama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital
6	Agenda Kegiatan Penting	Memampikan Agenda Kegiatan Penting Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital
7	Informasi Khusus lain yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat	Menyajikan jenis-jenis pelayanan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital

1	2	3	4	5	6	7
C	LAPORAN KINERJA BADAN PUBLIK					
1	LKJP Tahun 2022	Berisi tentang Informasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo Tahun 2022	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital
D LAPORAN KEUANGAN						
1	RKA Tahun 2023	Informasi Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital
2	DPA Tahun 2023	Informasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital
3	LRA Tahun 2022	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 yang sudah diaudit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital
4	CALK Tahun 2022	Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital
5	Neraca Tahun 2022	Neraca Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital
6	Data Aset dan Inventaris Tahun 2022	Informasi tentang Data Aset dan Inventaris Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital



1	2	3	4	5	6	7
E	LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK					
1	Laporan Ringkasan Informasi Publik Tahun 2022	Laporan yang memuat: 1) Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima; 2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik; 3) Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan yang ditolak; dan 4) Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital
F	PERATURAN BADAN PUBLIK					
1	Daftar rancangan rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Informasi tentang daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital
2	Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan Dan Kebijakan Yang Disahkan	Informasi Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan dan Kebijakan yang telah Disahkan	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital
G	TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK					
1	Prosedur Layanan Informasi Publik	Informasi Prosedur Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital

1	2	3	4	5	6	7
H	TATA CARA PENGADUAN MASYARAKAT					
1	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran	Informasi tata cara pengaduan dan atau pelaporan terkait penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital
I	PENGADUAN BARANG DAN JASA					
I	Informasi Pengaduan Barang dan Jasa	Informasi seputar Pengaduan Barang dan Jasa Tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital
J	PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT					
1	Prosedur Peringatan Dini Dan Evakuasi Darurat Terhadap Bencana	Informasi Prosedur Peringatan Dini Dan Evakuasi Darurat Terhadap Bencana atau Keadaan Darurat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital

## II. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

### INFORMASI BENCANA NON

1	Informasi Kejadian Bencana Alam	Informasi Kejadian Bencana Alam pada Aset yang kewenangan DPUPR	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital
2	Informasi tentang potensi rawan bencana	Informasi tentang potensi rawan bencana pada aset yang menjadi kewenangan DPUPR	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN WONOSOBO**

Nomor : 487.2/0451 /DPUPR

**TENTANG :**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN WONOSOBO**

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Mengingat : 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

III. INFORMASI WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

A DAFTAR INFORMASI PUBLIK						
1	Daftar Informasi Publik	Berisi tentang Informasi - informasi publik yang tersedia secara berkala, serta merta, setiap saat Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital dan Salinan Cetak
B INFORMASI TENTANG PERATURAN, KEPUTUSAN DAN/ATAU KEJAJAKAN BADAN PUBLIK						
1	Dokumen pendukung dari Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang ditetapkan	Dokumen yang berisi: 1. naskah akademis/ kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, 2. masukan dari berbagai pihak, 3. risalah rapat, rancangan peraturan, dan 4. tahap perumusan peraturan. 5. Peraturan keputusan, dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan. pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital dan Salinan Cetak
C INFORMASI TENTANG ORGANISASI, ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN						
1	Informasi mengenai Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;	Informasi Mengenai: 1. pedoman pengelolaan organisasi, 2. pedoman pengelolaan administrasi, 3. pedoman personil, dan 4. pedoman keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital dan Salinan Cetak

1	2	3	4	5	6	7
2	Informasi mengenai Profil lengkap pimpinan dan pegawai;	Informasi memuat: 1. nama, 2. sejarah karir atau posisi, 3. sejarah pendidikan, 4. penghargaan, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital dan Salinan Cetak
3	Informasi mengenai Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya;	Informasi mengenai: 1. dokumen anggaran secara umum, dan 2. dokumen laporan keuangan yang telah diaudit. pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital dan Salinan Cetak
4	Informasi mengenai Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik	Dokumen data statistik mengenai: 1. organisasi, 2. administrasi, 3. kepegawaian, dan 4. keuangan, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital dan Salinan Cetak
D	PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA					
1	Kejasama Dengan Pihak Ketiga	Informasi Perjanjian Kejasama dengan pihak ketiga yang masih berlaku di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital dan Salinan Cetak
E	DOKUMEN SURAT MENYURAT PIMPINAN/PEJABAT					

1	2	3	4	5	6	7
1	Dokumen Surat Menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya	Tentang dokumen surat menyurat Pimpinan/Pejabat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital dan Salinan Cetak



1	2	3	4	5	6	7
F	RENCANA STRATEGIS					
1	Rencana Strategis (RENSTRA)	Berisi tentang Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital dan Salinan Cetak
2	Rencana Kerja (RENUA)	Berisi tentang Dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital dan Salinan Cetak
G	AGENDA KERJA PIMPINAN					
1	Agenda Kerja Pimpinan	Agenda kerja dan kegiatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital dan Salinan Cetak
H	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK					
1	Sumber Daya Manusia Yang Menangani, Sarana Prasarana dan Anggaran layanan Informasi Publik	Informasi tentang Sumber Daya Manusia Yang Menangani, Sarana Prasarana dan Anggaran layanan Informasi Publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital dan Salinan Cetak
2	Laporan layanan Informasi Publik	Laporan layanan Informasi Publik yang masuk di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital dan Salinan Cetak
1	BERITA ONLINE					
1	Berita Online	Informasi dan berita seputar kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital

1	2	3	4	5	6	7
J	PENGUMUMAN					
1	Pengumuman	Informasi seputar Pengumuman di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital dan Salinan Cetak
2	Surat Edaran	Informasi seputar surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital dan Salinan Cetak
K	PENANGANAN PENGADUAN					
1	Informasi Pengaduan oleh masyarakat dan penanganannya	Informasi Pengaduan oleh masyarakat dan penanganannya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2023	Salinan Digital dan Salinan Cetak

KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN WONOSOBO

  
NURUDIN ARDIYANTO, ST. MT  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19731021200003 1 003

**DAFTAR USULAN INFORMASI DIKECUALIKAN  
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023**

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menimbulkan persaingan tidak sehat</li> <li>Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur (Informasi Publik)</li> <li>Memberikan penilaian tidak obyektif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efisiensi Anggaran karena diperoleh dengan harga penawaran wajar</li> <li>Menjaga Obyektivitas Penyedia jasa</li> </ul>	Terbatas sampai dengan selesainya Proses Pengad
2	Rencana Teknis Kegiatan (RAB dan Gambar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf B</li> </ul>	<p>Terjadinya persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Terjadinya hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menghambat persaingan tidak sehat</li> <li>Melindungi kerahasiaan Perusahaan</li> <li>Menjaga obyektivitas proses evaluasi rekomendasi teknis</li> </ul>	Selama Undang-undang membuat untuk dirahasi atau diungkapkan ke publi
3	Dokumen Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air dan Kelangkaan Pendukungnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 11 Tahun 1974 tentang Penyairan Permen PU/PR No I/RT/M/2016 Tentang Tata cara Perijinan Penggunaan SDA dan Penggunaan SDA</li> <li>UU 14 tahun 2008 tentang KIP - UU No 4 Th 2009 Tentang Pertumbuhan Mineral dan Batubara</li> <li>PP 121 Th 2015 Tentang Perusahaan Sumber Daya Air</li> <li>Permen PU/PR No I/RT/M/2016 Tentang Tata cara Perijinan Penggunaan SDA dan Penggunaan SDA</li> <li>KEPMEN PU No 458/KPTS/1986 Tentang Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan Penambahan Bahan Galian Golongan C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menimbulkan persaingan yang tidak sehat</li> <li>Membuka rahasia perusahaan</li> <li>Terhambatnya proses evaluasi rekomendasi teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghambat persaingan tidak sehat</li> <li>Melindungi kerahasiaan Perusahaan</li> <li>Menjaga obyektivitas proses evaluasi rekomendasi teknis</li> </ul>	Terjadinya hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat



3	<p>Rencana Pembangunan Trase Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air yang memerlukan pengadaan tanah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 11 th 1974 tentang Pengairan</li> <li>- UU No. 14 th 2008 tentang Ketersbukaan Informasi Publik ( KIP) pasal 6 ayat 3 huruf (c), Pasal 7 huruf (c) butir 4</li> <li>- Perpres No. 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum</li> <li>- sebagaimana telah diubah dengan Perpres 65 tahun 2006 tentang perubahan perpres 36 tahun 2005</li> </ul>	<p>Depat mengganggu proses pengadaan tanah</p>	<p>Menghindari para spekulan tanah.</p>	<p>Terbatas sampai dengan penetapan lokasi.</p>
4.	<p>Informasi Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 17 Tahun 2019 ng Sumber Daya Air</li> <li>- Permen PU/PR No.12/PRT/M/2015 ng O&amp;P Irigasi</li> <li>- Permen PU/PR No.23/PRT/M/2015 ng Pengelolaan Aset Irigasi</li> <li>- Permen PU/PR No.30/PRT/M/2015 ng Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuka data dan ralsasi informasi pengembangan sistem/saringan irigasi</li> <li>- Menimbulkan perubahan dan ketidakvalidan data</li> </ul>	<p>Menghindari penyalahgunaan data dan perubahan informasi yang tidak diijinkan</p>	<p>Terus berlanjut dikarenakan adanya perbaruan data ya dilakukan secara berkala/berkala</p>
5.	<p>Dokumen Bidang Penataan Ruang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Buku Materi Teknis Rencana Tata Ruang</li> <li>b. Peta Rencana Tata Ruang dalam format <i>Shapefile</i> (.shp)</li> <li>c. Dokumen teknis penyusunan Rencana Tata Ruang</li> <li>d. Dokumen analisa dan kajian kesesuaian perizinan pemanfaatan ruang</li> </ol>	<p>Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang L.ayaman Informasi Publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merupakan informasi publik yang belum dikuasai atau didokumentasikan</li> <li>- Ditinjau dari adanya perubahan data spasial dan muatan substansi dalam dokumen perencanaan tata ruang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak dimungkinkan adanya perubahan data spasial dan muatan substansi dalam dokumen perencanaan tata ruang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.</li> <li>- Menjaga obyektivitas proses evaluasi rekomendasi teknis</li> </ul>	<p>Terbatas sampai dengan selesainya proses rekomen teknis bidang Perencanaan Ru</p>

6.	Peta Rencana Struktur Ruang, Peta rencana pola ruang dan peta penetapan Kawasan Strategis pada raperda RTRW	UU 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 6 ayat (3) huruf e - Pasal 17 huruf e angka 4	Munculnya para spekulan tanah	Melindungi masyarakat dari para spekulan tanah	Sampai dengan disahkan RTRW Raperda menjadi
7	Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan	UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf B dan huruf H	Ketertarikan kemunan dari tindak kejahatan	Terjadinya tindak atas kekayaan intelektual dan Privasi serta kesnman dan kriminalitas	Selama Undang-undang membuat untuk dirubah atau diungkapkan ke pub
8	Proses Hukum PNS bermasalah	UUD Negara RI 1945 pasal 28A dan 28 H UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	- Mengungkap data pribadi PNS - Melakukan HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rubastis	Tidak terfatis Sampai berkekuatan hukum tetap/decuali karena keter Undang-Undang

Wonosobo,

Maret 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

  
NURUDIN ARDIYANTO, ST.MT  
 Pembina TK I  
 NIP. 19731021 200003 1 003